

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk variabel persepsi modernisasi administrasi perpajakan, sedangkan untuk kepatuhan wajib pajak menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran atas laporan KPP. Oleh karena itu, pengujian validitas dan reliabilitas hanya dilakukan pada variabel persepsi modernisasi administrasi perpajakan.

Mengingat data persepsi modernisasi administrasi perpajakan yang diperoleh dari kuesioner adalah data ordinal, maka untuk menguji validitasnya digunakan Spearman Rho, sedangkan reliabilitasnya menggunakan Spearman Brown. Secara umum ada dua tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.

Pertama, melakukan ujicoba instrumen. Sebelum mengumpulkan data penelitian sesuai dengan sampel yang ditentukan, yaitu 98, terlebih dahulu dilakukan ujicoba instrumen dengan sampel yang ditetapkan sebanyak 30 orang. Untuk keperluan ini dilakukan penyebaran kuesioner sebanyak 40 kuesioner. Dari 40 kuesioner yang disebar ada 36 kuesioner yang kembali dan dari 36 kuesioner yang kembali tersebut, selanjutnya dipilih 30 kuesioner yang jawabannya lengkap. Setelah diseleksi, kemudian dilakukan input data dan selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Kedua, melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner yang sudah valid dan reliabel. Kuesioner yang disebar adalah kuesioner yang sudah dihilangkan pernyataan yang tidak valid, yaitu pernyataan nomor 11 tentang monitoring rutin terhadap rekening wajib pajak atau *taxpayer's account* dalam membantu kewajiban perpajakan. Tahap ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 120 responden yang dipilih secara random dan sampel yang ditetapkan sebanyak 98 sesuai hasil perhitungan rumus Slovin di Bab II. Dari 120 kuesioner yang disebar, terdapat 109 kuesioner yang kembali, sehingga tingkat responnya sebesar 91,7%. Dari 109

kuesioner yang kembali, selanjutnya dipilih 98 kuesioner yang memiliki jawaban lengkap dan memenuhi kriteria.

Tabel IV.1
Hasil Uji Validitas Butir Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan

No. Butir	r hitung	r tabel ($\alpha = 0,05$)	Keterangan
1	0,569	0,361	Valid
2	0,719	0,361	Valid
3	0,766	0,361	Valid
4	0,842	0,361	Valid
5	0,812	0,361	Valid
6	0,755	0,361	Valid
7	0,650	0,361	Valid
8	0,573	0,361	Valid
9	0,690	0,361	Valid
10	0,648	0,361	Valid
11	0,119	0,361	Tidak Valid
12	0,689	0,361	Valid
13	0,774	0,361	Valid
14	0,722	0,361	Valid
15	0,836	0,361	Valid
16	0,648	0,361	Valid
Koefisien Spearman Brown	0,955		Reliabel

Dari hasil perhitungan di atas, terlihat untuk variabel modernisasi administrasi perpajakan dari 16 butir pernyataan terdapat 1 butir yang tidak valid, yaitu butir nomor 11. Sementara untuk uji reliabilitas diperoleh koefisien Spearman Brown sebesar 0,955. Nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh terlihat cukup besar sehingga menunjukkan bahwa instrumen persepsi modernisasi administrasi perpajakan memiliki reliabilitas yang baik.

B. Analisis Deskriptif

Berikut ini disajikan jawaban responden untuk setiap butir pernyataan pada masing-masing variabel penelitian. Jawaban yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi responden tentang modernisasi administrasi perpajakan yang meliputi aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, dan struktur organisasi.

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan

a. Sumber Daya Manusia

Sebagai gambaran untuk mengetahui modernisasi administrasi perpajakan khususnya dalam bidang sumber daya manusia, berikut ini disajikan hasil jawaban responden untuk masing-masing butir pernyataan yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner.

Tabel IV.2

Hasil Jawaban Responden Mengenai Penampilan Petugas KPP yang Rapi dan Sopan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	20	20,4
2	Setuju	50	51,0
3	Ragu-ragu	28	28,6
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Indikator pertama dari modernisasi sumber daya manusia adalah penampilan petugas KPP yang rapi dan sopan. Hal ini menjadi salah satu unsur objek modernisasi, karena masalah kerapian dan kesopanan petugas KPP diperlukan oleh wajib pajak. Dari jawaban di atas diketahui responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang atau 20,4%, menyatakan setuju 50 orang (51%), dan menyatakan ragu-ragu 28 orang (28,6%). Dari jawaban tersebut terlihat jawaban mayoritasnya adalah setuju, sehingga memberikan indikasi bahwa secara umum responden berpendapat bahwa petugas KPP memiliki penampilan yang rapi dan sopan.

Tabel IV.3
 Hasil Jawaban Responden Mengenai Petugas KPP Memiliki
 Keterampilan dalam Melayani Wajib Pajak

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	12	12,2
2	Setuju	67	68,4
3	Ragu-ragu	18	18,4
4	Tidak setuju	1	1,0
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Indikator yang kedua dari modernisasi sumber daya manusia adalah petugas KPP memiliki keterampilan dalam melayani wajib pajak. Keterampilan dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu kualifikasi yang mesti dimiliki oleh petugas KPP, karena ini akan mempengaruhi kepuasan wajib pajak dalam memperoleh pelayanan. Dari tabel di atas terlihat responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang atau 12,2%, menyatakan setuju 67 orang (68,4 %), menyatakan ragu-ragu 18 orang (18,4 %), dan menyatakan tidak setuju 1 orang (1%). Dari jawaban tersebut terlihat jawaban mayoritas adalah setuju, sehingga memberikan indikasi bahwa secara umum responden berpendapat bahwa petugas KPP memiliki ketrampilan dalam melayani wajib pajak.

Tabel IV.4

Hasil Jawaban Responden Mengenai Petugas KPP Melaksanakan Hal-Hal yang Telah Dijanjikan dengan Tepat

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	13	13,3
2	Setuju	45	45,9
3	Ragu-ragu	32	32,7
4	Tidak setuju	8	8,2
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Kemudian untuk indikator ketiga adalah petugas KPP melaksanakan hal-hal yang telah dijanjikan dengan tepat. Ketepatan dalam melakukan hal-hal yang telah dijanjikan merupakan salah satu aspek profesionalitas pegawai yang diharapkan oleh wajib pajak. Dari tabel di atas terlihat responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang atau 13,3 %, menyatakan setuju 45 orang (45,9 %), menyatakan ragu-ragu 32 orang (32,7 %), dan menyatakan tidak setuju 8 orang (8,2 %). Dari jawaban tersebut terlihat sebagian besar responden menyatakan setuju, sehingga memberikan indikasi bahwa secara umum responden berpendapat bahwa petugas KPP telah melaksanakan hal-hal yang telah dijanjikan dengan tepat. Namun demikian masih adanya 32,7 % responden yang meragukan ketepatan waktu petugas pajak dalam melakukan hal-hal yang telah dijanjikan.

Tabel IV.5

Hasil Jawaban Responden Mengenai Petugas KPP Mengerti Pekerjaannya dengan Baik

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	19	19,4
2	Setuju	54	55,1
3	Ragu-ragu	25	25,5
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Dari tabel di atas nampak bahwa, atas indikator persyaratan sumber daya manusia mengerti pekerjaannya dengan baik, dari 98 jawaban menyatakan sangat setuju sebanyak 19 orang (19,4 %), setuju 54 orang (55,1 %), dan ragu-ragu 25 orang (25,5 %). Dengan demikian secara umum dapat dilihat sebagian besar responden setuju akan persyaratan tersebut.

Tabel IV.6

Hasil Jawaban Responden Mengenai Penerapan Kode Etik Bagi Petugas KPP Meningkatkan Profesionalisme Petugas KPP

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	18	18,4
2	Setuju	55	56,1
3	Ragu-ragu	25	25,5
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Sehubungan dengan indikator penerapan kode etik bagi petugas KPP meningkatkan profesionalisme petugas KPP. Dari tabel nampak bahwa responden yang menyatakan tidak setuju 0, ragu-ragu 25 (25,5 %), setuju 55 (56,1 %), dan sangat setuju 18 (18,4 %). Dengan

demikian secara umum terlihat sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa petugas KPP menerapkan kode etik dalam meningkatkan profesionalisme.

Dari uraian tentang masing-masing indikator sumber daya manusia di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum responden menyatakan setuju atas modernisasi yang dilakukan KPP dalam bidang sumber daya manusia. Responden berpendapat bahwa modernisasi memiliki pengaruh positif pada aspek penampilan yang rapi dan sopan, ketrampilan dalam melayani, ketepatan dalam pelayanan, penguasaan atas pekerjaannya, dan mematuhi kode etik.

b. Teknologi Informasi

Di bawah ini disajikan kompilasi jawaban responden untuk mengetahui modernisasi administrasi perpajakan khususnya dalam bidang teknologi informasi. Terdapat lima poin pernyataan yang digunakan untuk mengungkap aspek tersebut.

Tabel IV.7

Hasil Jawaban Responden Mengenai Pembayaran Pajak dengan Sistem MP3/MPN yang Diterapkan di Bank Memberikan Kepastian Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	9	9,2
2	Setuju	66	67,3
3	Ragu-ragu	23	23,5
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator pembayaran pajak dengan sistem MP3/MPN yang diterapkan di bank memberikan kepastian wajib pajak dalam membayar pajak. Terbanyak responden menyatakan setuju (66 orang atau 67,3 %), ragu-ragu (23 orang atau 23,5 %), dan sangat setuju (9 orang atau 9,2 %). Dengan demikian secara umum responden setuju bahwa sistem MP3/MPN yang diterapkan di bank memberikan kepastian wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel IV.8

Hasil Jawaban Responden Mengenai Sistem Aplikasi Komputer yang Ada di TPT Berjalan Baik

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	15	15,3
2	Setuju	65	66,3
3	Ragu-ragu	18	18,4
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Dari tabel di atas nampak jawaban responden atas indikator sistem aplikasi komputer yang ada di TPT. Mayoritas responden menyatakan setuju (65 orang atau 66,3 %), ragu-ragu (18 orang atau 18,4 %), dan sangat setuju (15 orang atau 15,3 %). Dengan demikian secara umum responden setuju bahwa sistem aplikasi komputer yang ada di TPT berjalan baik.

Tabel IV.9

Hasil Jawaban Responden Mengenai Sistem Pendaftaran dengan *e-register* Memudahkan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	22	22,4
2	Setuju	33	33,7
3	Ragu-ragu	42	42,9
4	Tidak setuju	1	1,0
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Tabel di atas menunjukkan jawaban responden atas sistem pendaftaran dengan *e-register* memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Terbanyak responden menyatakan ragu-ragu (42 orang atau 42,9 %), setuju (33 orang atau 33,7 %), sangat setuju (22 orang atau 22,4 %), dan tidak setuju (1 orang atau 1,0 %). Mayoritas responden yang ragu-ragu terhadap sistem pendaftaran dengan *e-register*, menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi dari sistem ini. Kesulitan yang dihadapi responden dalam penggunaan *e-register* adalah penyebab keragu-raguan mereka akan keberhasilan implementasi dari sistem ini.

Tabel IV.10

Hasil Jawaban Responden Mengenai Pembayaran Pajak Melalui ATM dan Sistem Teknologi *e-payment* Memudahkan Kewajiban Pembayaran Pajak

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	23	23,5
2	Setuju	61	62,2
3	Ragu-ragu	14	14,3
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Dari tabel di atas menunjukkan hasil jawaban responden atas indikator pembayaran pajak melalui ATM dan sistem teknologi *e-payment* memudahkan kewajiban pembayaran pajak. Mayoritas responden menyatakan setuju (61 orang atau 62,2 %), sangat setuju (23 orang atau 23,5 %), ragu-ragu (14 orang atau 14,3 %). Dengan demikian secara umum responden setuju bahwa pembayaran pajak melalui ATM dan sistem teknologi *e-payment* memudahkan kewajiban pembayaran pajak.

Tabel IV.11

Hasil Jawaban Responden Mengenai Pengisian & Pelaporan SPT dengan *e-SPT* Meringankan Proses Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	14	14,3
2	Setuju	53	54,1
3	Ragu-ragu	29	29,6
4	Tidak setuju	2	2,0
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Tabel di atas menunjukkan jawaban responden atas indikator pengisian dan pelaporan SPT dengan *e-SPT* meringankan pemenuhan kewajiban perpajakan. Terbanyak responden menyatakan setuju (53 orang atau 54,1 %), ragu-ragu (29 orang atau 29,6 %), sangat setuju (14 orang atau 14,3 %), dan tidak setuju (2 orang atau 2,0 %). Dengan demikian secara umum responden setuju bahwa pengisian dan pelaporan SPT dengan *e-SPT* meringankan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dari uraian tentang masing-masing indikator teknologi informasi di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju atas empat indikator modernisasi yang dilakukan KPP dalam bidang teknologi informasi yaitu modernisasi memiliki pengaruh positif pada aspek sistem MP3/MPN di bank memberikan kepastian wajib pajak dalam membayar pajak, sistem aplikasi komputer yang ada di TPT berjalan baik, pembayaran pajak melalui ATM dan sistem teknologi *e-payment* memudahkan kewajiban pembayaran pajak, dan pengisian & pelaporan SPT menggunakan *e-SPT* meringankan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Sementara itu untuk indikator sistem pendaftaran dengan *e-register* memudahkan WP dalam memenuhi kewajiban, mayoritas responden menyatakan ragu-ragu atas hal tersebut.

c. Struktur Organisasi

Di bawah ini disajikan kompilasi jawaban responden untuk mengetahui modernisasi administrasi perpajakan khususnya dalam hal struktur organisasi. Terdapat lima poin pernyataan yang digunakan untuk mengungkap aspek tersebut.

Tabel IV.12

Hasil Jawaban Responden Mengenai Melakukan Pelaporan Pajak pada Satu Loker Menguntungkan bagi Wajib Pajak

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	19	19,4
2	Setuju	60	61,2
3	Ragu-ragu	19	19,4
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Dari tabel di atas dapat dilihat jawaban responden atas indikator pelaporan pajak pada satu loket menguntungkan bagi wajib pajak. Mayoritas responden menyatakan setuju 60 orang (61,2%), sangat

setuju 19 orang (19,4%), dan ragu-ragu 19 orang (19,4 %). Dengan demikian terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju atas pelaporan pajak pada satu loket menguntungkan bagi wajib pajak.

Tabel IV.13

Hasil Jawaban Responden Mengenai Mengurus Kewajiban Pajak Pada Satu Tempat (PPh, PPN, PBB, Pemeriksaan) Meringankan Beban Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	22	22,4
2	Setuju	54	55,1
3	Ragu-ragu	21	21,4
4	Tidak setuju	1	1,0
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Sehubungan dengan indikator mengurus kewajiban pajak pada satu tempat (PPh, PPN, PBB, pemeriksaan) meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dari tabel nampak bahwa responden menyatakan tidak setuju (1 orang atau 1,0%), ragu-ragu (21 orang atau 21,4%), sangat setuju (22 orang atau 22,4%), dan setuju (54 orang atau 55,1 %). Dengan demikian dapat dilihat sebagian besar responden setuju bahwa mengurus kewajiban pajak pada satu tempat (PPh, PPN, PBB, pemeriksaan) dapat meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel IV.14

Hasil Jawaban Responden Mengenai Keberadaan AR Membantu Wajib Pajak dalam Memperoleh Interpretasi Peraturan Perpajakan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	15	15,3
2	Setuju	60	61,2
3	Ragu-ragu	21	21,4
4	Tidak setuju	2	2,0
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Dari tabel di atas nampak jawaban responden atas indikator keberadaan AR membantu wajib pajak dalam memperoleh interpretasi peraturan perpajakan. Mayoritas responden menyatakan setuju 60 orang (61,2 %), ragu-ragu 21 orang (21,4 %), sangat setuju 15 orang (15,3 %), dan tidak setuju 2 orang (2,0 %). Dengan demikian secara umum responden setuju bahwa keberadaan AR membantu wajib pajak dalam memperoleh interpretasi peraturan perpajakan.

Tabel IV.15

Hasil Jawaban Responden Mengenai Pelayanan dan Pengawasan Satu Pintu Melalui Fungsi *Account Representative* Membantu Wajib Pajak akan Pelayanan yang Dibutuhkan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	22	22,4
2	Setuju	50	51,0
3	Ragu-ragu	26	26,5
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Dalam hal indikator pelayanan dan pengawasan satu pintu melalui fungsi *Account Representative* membantu wajib pajak akan pelayanan yang dibutuhkan, dari tabel nampak responden menyatakan setuju (50 orang atau 51 %), ragu-ragu (26 orang atau 26,5 %), dan sangat setuju (22 orang atau 22,4 %). Dengan demikian secara umum responden setuju bahwa pelayanan dan pengawasan satu pintu melalui fungsi *Account Representative* membantu wajib pajak akan pelayanan yang dibutuhkan.

Tabel IV.16

Hasil Jawaban Responden Mengenai Peniadaan Fungsi Keberatan di KPP Menambah Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Proses Pemeriksaan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	24	24,5
2	Setuju	51	52,0
3	Ragu-ragu	23	23,5
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		98	100

Dari tabel di atas nampak jawaban responden atas peniadaan fungsi keberatan di KPP menambah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap proses pemeriksaan. Mayoritas responden yang menyatakan setuju 51 orang (52 %), sangat setuju 24 orang (24,5 %), dan ragu-ragu 23 orang (23,5 %). Dengan demikian secara umum responden setuju bahwa peniadaan fungsi keberatan di KPP menambah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap proses pemeriksaan.

Dari uraian atas seluruh indikator struktur organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum responden setuju atas modernisasi yang dilakukan KPP dalam bidang struktur organisasi. Responden berpendapat bahwa modernisasi telah memberikan pengaruh positif dalam hal pelaporan pajak pada satu loket menguntungkan bagi wajib pajak, mengurus kewajiban pajak pada satu tempat (PPh, PPN, PBB, pemeriksaan) meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, keberadaan AR membantu wajib pajak dalam memperoleh interpretasi peraturan perpajakan, pelayanan dan pengawasan satu pintu melalui fungsi AR membantu wajib pajak akan pelayanan yang dibutuhkan, dan peniadaan fungsi keberatan di KPP menambah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap proses pemeriksaan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Di bawah ini disajikan gambaran tentang kepatuhan wajib pajak yang ditinjau dari kepatuhan dalam hal melaporkan dan membayar pajaknya. Kepatuhan tersebut dilihat berdasarkan kepatuhan dalam melaporkan dan membayar Masa PPh 21, Masa PPh 25, Masa PPN, Tahunan PPh 25/29, dan Tahunan PPh 21. Penskalaan yang digunakan dalam pengukuran kepatuhan wajib pajak adalah seperti tertera pada tabel II.3, II.4, II.5, dan II.6 (hal 42).

a. Pelaporan

Di bawah ini adalah data kepatuhan wajib pajak yang dilihat berdasarkan pelaporan SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh 25, SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh 25 dan SPT Tahunan PPh 21.

Tabel IV.17

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelaporan SPT Masa PPh 21

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Patuh	92	93,9
2	Kurang Patuh	4	4,1
3	Tidak Patuh	2	2,0
Jumlah		98	100

Dari data di atas terlihat wajib pajak yang tergolong patuh sebanyak 92 orang (93,9%), kurang patuh 4 orang (4,1%) dan tidak patuh sebanyak 2 orang (2%). Data tersebut memberikan gambaran bahwa secara umum wajib pajak patuh dalam melaporkan SPT Masa PPh 21.

Tabel IV.18

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelaporan SPT Masa PPh 25

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Patuh	84	85,7
2	Kurang Patuh	2	2,0
3	Tidak Patuh	12	12,2
Jumlah		98	100

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa wajib pajak yang tergolong patuh sebanyak 84 orang (85,7%), kurang patuh 2 orang (2%) dan tidak patuh sebanyak 12 orang (12,2%). Data tersebut memperlihatkan bahwa secara umum wajib pajak patuh dalam melaporkan SPT Masa PPh 25.

Tabel IV.19

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelaporan SPT Masa PPN

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Patuh	45	45,9
2	Kurang Patuh	11	11,2
3	Tidak Patuh	42	42,9
Jumlah		98	100

Sehubungan indikator kepatuhan wajib pajak atas pelaporan SPT PPN, dari tabel terlihat bahwa wajib pajak yang tergolong patuh sebanyak 45 orang (45,9 %), kurang patuh 11 orang (11,2 %) dan tidak patuh sebanyak 42 orang (42,9%). Dengan demikian secara umum wajib pajak memiliki kecenderungan kurang/tidakpatuh dalam melaporkan SPT Masa PPN (jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang patuh).

Tabel IV.20

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelaporan SPT Tahunan PPh 25/29

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Patuh	77	78,6
2	Kurang Patuh	2	2,0
3	Tidak Patuh	19	19,4
Jumlah		98	100

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator kepatuhan wajib pajak berupa pelaporan SPT Tahunan PPh 25/29. Masing-masing terdiri atas patuh (77 orang atau 78,6%), tidak patuh (19 orang atau 19,4%), dan kurang patuh (2 orang atau 2,0 %). Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum wajib pajak patuh dalam pelaporan SPT tahunan PPh 25/29.

Tabel IV.21

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelaporan SPT Tahunan 21

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Patuh	88	89,8
2	Kurang Patuh	3	3,1
3	Tidak Patuh	7	7,1
Jumlah		98	100

Dalam hal indikator kepatuhan wajib pajak berupa pelaporan SPT Tahunan PPh 21, dari tabel nampak wajib pajak yang tergolong patuh sebanyak 88 orang (89,8 %), tidak patuh sebanyak 7 orang (7,1%), dan kurang patuh 3 orang (3,1 %). Dengan demikian secara umum wajib pajak patuh dalam melakukan pelaporan SPT tahunan PPh 21.

Dari seluruh indikator kepatuhan pelaporan pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum wajib pajak patuh dalam melaksanakan

keajiban pelaporan pajak. Khususnya dalam melaporkan SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh 25, SPT Tahunan PPh 25/29 dan SPT Tahunan PPh 21. Sementara untuk pelaporan SPT Masa PPN ada kecenderungan wajib pajak tidak patuh.

b. Pembayaran

Berikut ini adalah data kepatuhan wajib pajak yang dilihat berdasarkan pembayaran Masa PPh 21, Masa PPh 25, Masa PPN, Tahunan PPh 25/29 dan Tahunan PPh 21.

Tabel IV.22

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Masa PPh 21

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Patuh	60	61,2
2	Kurang Patuh	27	27,6
3	Tidak Patuh	11	11,2
Jumlah		98	100

Dapat dilihat dari tabel di atas wajib pajak yang tergolong patuh dalam pembayaran PPh 21 sebanyak 60 orang (61,2%), kurang patuh 27 orang (27,6%) dan tidak patuh sebanyak 11 orang (11,2%). Data tersebut memberikan gambaran bahwa secara umum wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran Masa PPh 21.

Tabel IV.23

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Masa PPh 25

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Patuh	17	17,3
2	Kurang Patuh	28	28,6
3	Tidak Patuh	53	54,1
Jumlah		98	100

Terlihat dari tabel di atas wajib pajak yang tergolong patuh dalam pembayaran Masa PPh 25 sebanyak (17 orang atau 17,3%), kurang patuh (28 orang atau 28,6%) dan tidak patuh sebanyak (53 orang atau 54,1%). Data tersebut memberikan gambaran bahwa secara umum wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pembayaran Masa PPh 25.

Tabel IV.24

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Masa PPN

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Patuh	26	26,5
2	Kurang Patuh	24	24,5
3	Tidak Patuh	48	49,0
Jumlah		98	100

Sehubungan indikator kepatuhan pajak berupa pelaporan masa PPN, dapat dilihat dari tabel bahwa wajib pajak yang tergolong tidak patuh 48 orang (49,0 %), patuh 26 orang (26,5 %), kurang patuh 24 orang (24,5 %). Dengan demikian dapat dilihat bahwa secara umum wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pembayaran Masa PPN.

Tabel IV.25

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Tahunan PPh 25/29

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Patuh	53	54,1
2	Kurang Patuh	4	4,1
3	Tidak Patuh	41	41,8
		98	100

Berdasarkan tabel di atas diketahui wajib pajak yang tergolong patuh dalam pembayaran pajak Tahunan PPh 25/29 sebanyak 53

orang (54,1%), tidak patuh 41 (41,8 %), dan kurang patuh 4 orang (4,1%). Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara umum wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran pajak Tahunan PPh 25/29, walaupun juga ada 41 wajib pajak yang tidak patuh.

Tabel IV.26

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Tahunan PPh 21

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Patuh	76	77,6
2	Kurang Patuh	6	6,1
3	Tidak Patuh	16	16,3
Jumlah		98	100

Dari tabel di atas dapat dilihat wajib pajak yang tergolong patuh dalam pembayaran pajak Tahunan PPh 21 sebanyak 76 orang (77,6%), tidak patuh 16 orang (16,3%), dan kurang patuh 6 orang (6,1%). Data tersebut memberikan gambaran bahwa secara umum wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran Tahunan PPh 21.

Dari seluruh indikator pembayaran pajak di atas, dapat dilihat bahwa secara umum wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, khususnya dalam membayar Masa PPh 21, Tahunan PPh 21 dan Tahunan PPh 25/29. Sementara untuk pembayaran Masa PPh 25 dan Masa PPh 29 ada kecenderungan wajib pajak kurang/tidak patuh.

D. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Setelah dibahas tentang analisis deksriptif untuk mengetahui kondisi masing-masing variabel, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis penelitian. Di bawah ini disajikan hasil pengujian hipotesis penelitian tentang pengaruh persepsi modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang disertai dengan analisis tambahan untuk pengaruh indikator modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 15.0.

1. Pengaruh Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Output pertama yang dibahas adalah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi menggambarkan keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, sedangkan koefisien determinasi menunjukkan kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah output SPSS yang terdiri dari koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang menunjukkan hubungan dan kontribusi modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel IV.27

Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Hubungan Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.779 ^a	.606	.602	.23167

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Administrasi Perpajakan

Dari output di atas diketahui koefisien korelasinya sebesar 0,779 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, maka semakin patuh wajib pajak baik dalam melaporkan maupun membayar kewajiban perpajakannya. Untuk mengetahui kategorisasi hubungan antara modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak digunakan kriteria Guilford (1956) sebagai berikut :

Tabel IV.28

Kriteria Koefisien Korelasi Guilford

Koefisien Korelasi	Kategori Hubungan
< 0,20	Sangat kecil dan bisa diabaikan
0,20 - < 0,40	Tidak erat
0,40 - < 0,70	Cukup erat
0,70 - < 0,90	Erat
0,90 - < 1,00	Sangat erat
1,00	Sempurna

Sebagaimana telah disebutkan di atas, hasil perhitungan koefisien korelasi hubungan modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,779. Berdasarkan kriteria Guildford di atas, maka secara kualitatif koefisien korelasi sebesar 0,779 berarti hubungannya tergolong erat. Koefisien korelasinya positif, sehingga makin baik implementasi modernisasi administrasi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasinya sebesar 0,606, yang berarti 60,6% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh modernisasi administrasi perpajakan.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t yang outputnya dapat dilihat pada tabel. Hipotesis yang diuji dirumuskan sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat pengaruh persepsi modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Satu.

Ha: Terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Satu.

Output uji t dan juga koefisien regresi untuk menguji hipotesis di atas adalah sebagai berikut:

Tabel IV.29

Uji t dan Koefisien Regresi Pengaruh Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.032	.118		-.271	.787
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.506	.042	.779	12.158	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dapat dilihat dari output di atas nilai t hitung yang diperoleh yaitu sebesar 12,158. Sementara t tabel untuk tingkat kesalahan 5% atau keyakinan 95% dan *degree of freedom* sebesar 96 sebesar 1,665. Dengan demikian diketahui t hitung (12,158) lebih besar dari t tabel (1,665). Dengan demikian H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga kesimpulannya adalah: terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Satu.

Dari output di atas juga diketahui nilai konstanta sebesar -0,032 dan koefisien regresi 0,506 sehingga dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: $\hat{Y} = -0,032 + 0,506X$. Nilai konstanta pada persamaan di atas memiliki makna bahwa pada saat variabel modernisasi administrasi perpajakan bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 0,032. Dari persamaan tersebut juga diketahui koefisien regresinya bernilai positif (0,506), sehingga menggambarkan adanya pengaruh yang berbanding lurus antara modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, setiap kenaikan satu satuan variabel modernisasi administrasi perpajakan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,506 pada konstanta -0,032.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, terbukti bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib sesuai dengan teori-teori yang digunakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Silviani⁸⁴, tujuan administrasi pajak adalah membantu perkembangan kepatuhan pajak secara sukarela. Kepatuhan secara sukarela ini dapat ditingkatkan jika administrasi dapat membangun prospek yang kuat, dalam arti wajib pajak yang tidak melunasi pajak akan terdeteksi dan akan dikenakan sanksi. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak akan berlanjut jika didukung dengan administrasi yang efektif. Selaras dengan pendapat tersebut, Hom dalam artikelnya "Improving Tax Administration and Compliance" juga menyatakan bahwa sasaran dari administrasi pajak modern adalah untuk membantu kepatuhan yang

⁸⁴ Carlos A. Silvani, op. cit. hal. 72.

sukarela, mendeteksi dan menghukum penyelundup pajak atau memburu penunggak pajak. Kepatuhan sukarela didorong serta ketidakpatuhan berusaha ditemukan dan kemudian dihukum. Kepatuhan pajak akan maju bila administrasi pajak efektif. Hal itu juga ditegaskan oleh Toshiyuki bahwa target akhir dari reformasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁸⁵

2. Pengaruh Indikator Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai tambahan analisis, berikut ini disajikan hasil perhitungan korelasi dan regresi pengaruh indikator modernisasi administrasi perpajakan yang meliputi sumber daya manusia, teknologi informasi dan struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

a. Pengaruh Modernisasi Sumber Daya Manusia terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Output SPSS yang terdiri dari koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang menunjukkan hubungan dan kontribusi modernisasi sumber daya manusia terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.30

Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Hubungan Modernisasi Sumber Daya Manusia dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	.538	.533	.25099

a. Predictors: (Constant), SDM

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai sebesar 0,733. Merujuk pada kriteria Guilford, maka secara kualitatif koefisien korelasi sebesar 0,733 berarti hubungannya

⁸⁵ Fushimi Toshiyuki, op.cit. hal. 42.

tergolong erat. Koefisien korelasi yang diperoleh bernilai positif yang berarti semakin baik modernisasi sumber daya manusia, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi yang menunjukkan kontribusi sumber daya manusia terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 53,8%.

Output uji t dan koefisien regresi untuk menguji signifikansi pengaruh modernisasi sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel IV.31
Uji t dan Koefisien Regresi Pengaruh Modernisasi Sumber Daya Manusia terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.216	.112		1.922	.058
	Pelayanan dan SDM	.438	.041	.733	10.570	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan uji t terlihat nilai t hitung sebesar 10,57, sedangkan nilai t tabel menggunakan tingkat kesalahan 5% dan *degree of freedom* sebesar 96 sebesar 1,665. Dengan demikian diketahui t hitung (10,57) lebih besar dari t tabel (1,665), sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Satu.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh konstanta sebesar 0,216 dan koefisien regresi 0,438 sehingga dapat disusun persamaan regresi $\hat{Y} = 0,216 + 0,438X_1$. Dari persamaan tersebut maka dapat diketahui pada saat variabel modernisasi sumber daya manusia bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,216. Dari persamaan di atas juga diketahui koefisien regresinya bernilai positif (0,438), yang menggambarkan adanya pengaruh berbanding lurus antara modernisasi sumber daya manusia terhadap

kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, setiap kenaikan satu satuan variabel modernisasi sumber daya manusia menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,438 pada konstanta 0,216.

Sebagaimana dikemukakan Caiden⁸⁶ bahwa tujuan reformasi administrasi adalah untuk meningkatkan kinerja administrasi institusi dan organisasi publik, dan individu dalam organisasi. Caiden menyebut tujuan reformasi administrasi adalah untuk : *...improve the administrative performance of individual, groups, and institutions and to advise them how they can achieve their operating goals more effectively, more economically, and more quickly.* Sementara kinerja yang dimaksud merupakan kinerja individu, kelompok, dan institusi. Ini berarti selain aspek kelembagaan, mencakup juga aspek perilaku dari individu atau sumber daya manusia yang ada dalam reformasi administrasi tersebut. Oleh karena itu modernisasi sumber daya manusia sebagai bagian dari modernisasi administrasi pajak juga berperan dalam mencapai tujuan akhir berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak⁸⁷.

b. Pengaruh Modernisasi Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Di bawah ini adalah output SPSS yang terdiri dari koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang menunjukkan hubungan modernisasi teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel IV.32

Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Hubungan Modernisasi Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 ^a	.512	.507	.25782

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi Terkini

⁸⁶ Gerald E. Caiden, op. cit. hal 12.

⁸⁷ Fushimi Toshiyuki, op.cit. hal.42.

Koefisien korelasi yang memperlihatkan hubungan antara modernisasi teknologi informasi dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,716. Merujuk pada kriteria Guilford, maka secara kualitatif koefisien korelasi sebesar 0,716 berarti hubungannya tergolong erat. Koefisien korelasi yang diperoleh bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa modernisasi teknologi informasi mempunyai hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin baik pelaksanaan modernisasi teknologi informasi, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,512, sehingga menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel modernisasi teknologi informasi sebesar 51,2%.

Selanjutnya, output uji t dan koefisien regresi pengaruh modernisasi teknologi informasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.33
Uji t dan Koefisien Regresi Pengaruh Modernisasi Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.104	.129		.802	.424
	Teknologi Informasi Terkini	.441	.044	.716	10.044	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan uji t di atas terlihat nilai t hitung yang diperoleh sebesar 10,044. Sementara t tabel menggunakan tingkat kesalahan 5% dan df 96 adalah 1,665. Oleh karena nilai t hitung (10,044) lebih besar dari t tabel (1,665), maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Satu.

Dari hasil perhitungan regresi diperoleh konstanta 0,104 dan koefisien regresi 0,441. Dari nilai-nilai tersebut, selanjutnya dapat disusun persamaan regresi $\hat{Y} = 0,104 + 0,441X_2$. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,104 yang memiliki makna bahwa pada saat variabel modernisasi teknologi informasi bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,104. Dari persamaan di atas diketahui koefisien regresinya bernilai positif sebesar 0,441, yang menggambarkan adanya pengaruh berbanding lurus modernisasi teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel modernisasi teknologi informasi menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,441 pada konstanta 0,104.

Modernisasi terhadap teknologi informasi juga merupakan agenda dalam reformasi administrasi perpajakan. Hal ini mengingat kunci perbaikan birokrasi yang berbeli-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Diharapkan dengan *full automation*, akan tercipta suatu *business process* yang efisien dan efektif, karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. Pelayanan yang baik dan cepat tersebut menurut Silvani⁸⁸, merupakan salah satu hal yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

⁸⁸ Carlos A.Silvani, op.cit. hal. 72.

c. Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Di bawah ini disajikan output SPSS terdiri dari koefisien korelasi dan koefisien determinasi hubungan modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel IV.34

Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Hubungan Modernisasi Struktur Organisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 ^a	.510	.505	.25851

a. Predictors: (Constant), Struktur Organisasi

Terlihat koefisien korelasi yang menunjukkan hubungan modernisasi struktur organisasi dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,714. Berdasarkan pedoman koefisien korelasi, maka secara kualitatif koefisien korelasi sebesar 0,714 berarti hubungannya tergolong erat. Koefisien korelasi yang diperoleh bernilai positif, sehingga menunjukkan bahwa modernisasi struktur organisasi mempunyai hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin baik modernisasi struktur organisasi, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi yang menunjukkan kontribusi modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,51, sehingga memberikan pengertian bahwa tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel modernisasi struktur organisasi sebesar 51%. Selanjutnya di bawah ini disajikan output uji t dan regresi untuk uji signifikansi pengaruh modernisasi struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel IV.35

Uji t dan Koefisien Regresi Pengaruh Modernisasi Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.184	.122		1.511	.134
	Struktur Organisasi	.424	.042	.714	9.991	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai sebesar 9,991, sedangkan nilai t tabelnya sebesar 1,665. Karena nilai t hitung (9,991) lebih besar dari t tabel (1,665), maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi struktur organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Satu. Dari hasil perhitungan regresi diperoleh konstanta sebesar 0,184 dan koefisien regresi 0,424. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat disusun persamaan regresi $\hat{Y} = 0,184 + 0,424X$. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,184 yang memiliki makna bahwa pada saat variabel modernisasi struktur organisasi memiliki 0, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,184. Dari persamaan di atas juga diketahui koefisien regresinya bernilai positif (0,424), yang menggambarkan adanya pengaruh berbanding lurus modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel modernisasi struktur organisasi menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,424 pada konstanta 0,184.

Reformasi struktur organisasi memang diperlukan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Robbins mengemukakan bahwa semakin besar organisasi maka kurang pula keefektifan organisasi. Pembengkakan birokrasi menyebabkan penumpukan pegawai dengan tugas yang tidak jelas, garis pertanggung jawaban yang tidak jelas dan sangat sedikit pegawai yang profesional. Hal ini

menimbulkan pemborosan dalam pengelolaan birokrasi⁸⁹. Dari segi struktur organisasi, KPP Pratama telah membuat terobosan dengan menunjuk *Account Representative* (AR) untuk masing-masing Wajib Pajak, sehingga dapat sekaligus digunakan sebagai sarana untuk menciptakan hubungan baik dengan wajib pajak. AR direkrut secara khusus dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan perpajakan secara langsung, edukasi dan asistensi serta mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Kebijakan penunjukan AR untuk setiap Wajib Pajak juga bertujuan agar permasalahan perpajakan Wajib Pajak dapat segera ditangani dengan efektif. Dengan adanya AR, diharapkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dapat berjalan secara optimal dan profesional sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik lagi.

d. Pengaruh Indikator Modernisasi Sumber Daya Manusia, Modernisasi Teknologi Informasi, dan Modernisasi Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah di atas dilakukan pengujian secara sendiri, berikut ini disajikan hasil perhitungan secara simultan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, dan modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Output SPSS yang terdiri dari koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang menunjukkan hubungan dan kontribusi modernisasi sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, dan modernisasi struktur organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

⁸⁹ Robbins, Stephen. (1994). *Organization Theory: Structure, Design and Applications*, Terjemahan. Yusuf Udaya, Teori Organisasi : Struktur, Desain, dan Aplikasi, Arcan, hal. 98.

Tabel IV.36

Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Hubungan Modernisasi Sumber Daya Manusia, Modernisasi Teknologi Informasi, dan Modernisasi Struktur Organisasi dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.779 ^a	.606	.594	.23409

a. Predictors: (Constant), Struktur Organisasi, Teknologi Informasi Terkini, SDM

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai sebesar 0,779. Merujuk pada kriteria Guilford, maka secara kualitatif koefisien korelasi sebesar 0,779 berarti hubungannya tergolong erat. Koefisien korelasi yang diperoleh bernilai positif yang semakin baik modernisasi sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, dan modernisasi struktur organisasi, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi yang menunjukkan kontribusi modernisasi sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, dan modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 60,6%.

Output uji F untuk menguji signifikansi pengaruh modernisasi sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, dan modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.37

Uji t dan Koefisien Regresi Pengaruh Modernisasi Sumber Daya Manusia, Modernisasi Teknologi Informasi, dan Modernisasi Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.935	3	2.645	48.272	.000 ^a
	Residual	5.151	94	.055		
	Total	13.086	97			

a. Predictors: (Constant), Struktur Organisasi, Teknologi Informasi Terkini, SDM

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari output di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 48,272, sementara nilai F tabel untuk $df = 94$ sebesar 2,71. Karena F hitung $>$ F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, dan modernisasi struktur organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan tersebut di atas selaras dengan pendapat Toshiyuki⁹⁰ bahwa target akhir dari reformasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nasucha⁹¹, salah satu tugas utama yang diemban reformasi administrasi pajak adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi. Selanjutnya, output persamaan regresi dan uji t untuk menguji signifikansi koefisien regresi disajikan pada tabel berikut:

⁹⁰ Fushimi Toshiyuki, op.cit. hal. 42.

⁹¹ Chaizi Nasucha, op. cit. hal. 14.

Tabel IV.38

Uji t dan Koefisien Regresi Pengaruh Modernisasi Sumber Daya Manusia, Modernisasi Teknologi Informasi, dan Modernisasi Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.033	.122		-.269	.788
	SDM	.172	.076	.289	2.259	.026
	Teknologi Informasi Terkini	.176	.069	.286	2.551	.012
	Struktur Organisasi	.158	.069	.266	2.303	.024

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari output di atas, maka dapat dituliskan persamaan regresi berganda $\hat{Y} = -0,033 + 0,172X_1 + 0,176X_2 + 0,158X_3$. Dari persamaan tersebut maka dapat diketahui pada saat variabel modernisasi sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, dan modernisasi struktur organisasi bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 0,033. Dari persamaan di atas juga diketahui semua koefisien regresinya bernilai positif, yang menggambarkan adanya pengaruh berbanding lurus modernisasi sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, dan modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t terlihat nilai t hitung untuk semua koefisien regresi lebih besar dari t tabelnya (1,665). Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, dan modernisasi struktur organisasi secara parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan koefisien betanya, maka dapat diketahui bahwa modernisasi sumber daya manusia merupakan indikator yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak, diikuti modernisasi teknologi informasi, dan modernisasi struktur organisasi.